# Instrumen Ekonomi Syariah untuk Transformasi Masyarakat[*)]

**Oleh Aziz Budi Setiawan[**)]**

## A. Mukadimah

Pendekatan ekonomi konvensional yang berlebihan terhadap pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*), memang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian di Dunia Barat. Tetapi dibalik keberhasilan ini, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif lahirnya ilmu ekonomi.[1] Hal itu kemudian juga menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang diistilahkan oleh Fukuyama "kekacauan yang besar (*the great disruption*)".

Kekacauan ini diantaranya berkaitan dengan runtuhnya sistem keluarga. Dalam konsepsi kapitalis, mengasuh dan merawat anak, diyakini membutuhkan pengorbanan yang besar yang dianggap sebagai suatu kerugian dalam ukuran materialis dan hedonis. Mentalitas pasar yang mendorong untuk memenuhi kepuasan/kepentingan pribadi yang telah disuntikan kedalam keluarga, menyebabkan para orang tua tidak mampu untuk berhubungan baik satu sama lainnya. Terjadi peningkatan hubungan seks bebas, perceraian, dan keluarga dengan orang tua tunggal menimbulkan penderitaan emosional, kejiwaan, serta material pada anak-anak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan keruntuhan kontrol sosial. Kenakalan remaja dan *anomie* yang semakin meningkat, menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini menjadi semakin buruk, ketika sejumlah proporsi signifikan dalam masyarakat terperangkap keganasan roda kemiskinan, hidup dalam penderitaan di kota-kota besar, dan terpenjara oleh *ghetto pathology*, tingkat pengangguran yang kronis dan kriminalitas yang tinggi.[2] Realitas ini merebak dan telah menjangkiti hampir seluruh negeri, termasuk negeri-negeri muslim.

Tren atau kecenderungan kemiskinan juga mengarah menjadi semakin buruk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dolar AS sehari meningkat dari 1,19 milyar pada 1987 menjadi 1,21 milyar pada 1997 atau sekitar 20 persen dari penduduk dunia. Dan sekitar 1,6 milyar atau 25 persennya lagi dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dolar AS setiap hari. Kesenjangan pendapatan antara seperlima penduduk negara-negara terkaya dengan seperlima penduduk yang hidup di negara-negara termiskin meningkat dua kali lipat pada 1960-1990: dari 30 berbanding 1 menjadi 60 berbanding 1. Pada 1998, kesenjangan itu semakin bertambah lebar, menjadi 78 berbanding 1.[3] Tahun 2001, jumlah orang miskin telah menjadi 1,3 milyar dengan penyebaran; 950 juta merupakan gabungan yang mendiami kawasan Asia selatan, Asia

---

*) Sebagian besar gagasan paper ini pernah diterbitkan pada **Jurnal Kordinat** Edisi: Vol.VII No.2, Oktober 2005.

**) Peneliti The Indonesia Economic Intelligence.

1 M. Umar Chapra, "The Future of Economics; an Islamic Perspective", Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2001, hal. 45.

2 Ibid., hal. 46.

3 Laporan The United Nations Human Development Report, 1999 sebagaimana dikutip dalam laporan spesial The International Forum on Globalization (IFG), "Does Globalization Help The Poor?", edisi terjemah, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003, hal. 28-29.

Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik. Sementara dikawasan Afrika Sub-Sahara terdapat 220 juta orang miskin, sedangkan di Amerika Latin dan Kawasan Karibia terdapat 110 juta orang miskin. Kemikinan juga merambahkira-kira sepertiga dari penduduk atau 120 juta orang di Eropa Timur dan di Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Negara-negara industri juga tak luput dirundung masalah ini. Kendati disana terdapat kekayaan yang melimpah, namun demikian, jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan masih tinggi, kira-kira 100 juta orang.[4] Tentu saat ini, kondisi kemisikinan dan kesenjangan tersebut semakin memburuk karena trennya memang mengarah demikian.

Kekacauan ekonomi juga terjadi secara global akibat "globalisasi ekonomi" yang tidak adil. Globalisasi ekonomi yang tidak adil, berdampak 'hanya' menguntungkan perusahaan multinasional (*Multi National Corporations/MNCs*). Globalisasi sebagian besar merupakan cerita bagaimana perusahaan multinasional mengambil alih peran negara dalam menentukan jalannya perekonomian dunia. Globalisasi ekonomi dan berbagai peraturan birokrasi global telah membuat korporasi-korporasi multinasional mampu bergabung menjadi satu, menyuarakan satu kepentingan. Sebanyak 200 korporasi besar papan atas dunia menguasai 28 persen aktivitas perekonomian global. Sementara itu 500 korporasi papan atas memegang 70 persen perdagangan dunia, dan 1000 korporasi papan atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia.[5] Hal ini memang diharapkan dan sejalan dengan visi dari sistem kapitalis yang berparadigma pasar (*market mechanism paradigm*), yang menyerahkan jalannya ekonomi sepenuhnya kepada pasar. Pemerintah hanya akan turut campur ketika pasar diganggu oleh interupsi luar (*externalities*) atau kegagalan pasar (*market failures*). Padahal *externalities* atau *market failures* sangat bias standarnya. Globalisasi dianggap memberikan efek efisien kepada proses perdagangan dunia, meski sesungguhnya hanya menguntungkan kapitalis global sebagai pemilik MNCs. Dampaknya adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang dan meninggalkan kemiskinan yang meluas. Banyaknya busung lapar yang terkuak akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit.

Kekacauan juga terindikasi pada kesenjangan pertumbuhan pasar uang (*money market*) dan pasar obligasi (*bond market*) berikut pasar sekundernya (*secondary market*) yang begitu cepat, hingga pertumbuhannya melampaui pertumbuhan perdagangan di sektor ril. Perkembangan baik kualitas maupun kuantitas transaksi di pasar ini berakibat ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Berdasarkan data yang dimiliki sebuah NGO ekonomi di AS, volume transaksi yang terjadi di pasar uang dan pasar derivatif mencapai 1,5 triliun dolar AS dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS setiap tahun.[6] Sedangkan data World Bank terbaru menunjukan volume transaksi di pasar uang mencapai 500 triliun dolar AS, sedangkan volume transaksi yang terjadi di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS dalam satu tahun.[7] Besarnya volume pasar uang dan pasar

---

[4] Laporan Shukor Rahman dalam *New Straits of Malaysia Times*, 2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG, Ibid.

[5] Lihat tulisan Robert Kaplan dalam *The Atlantik Montly*, 1997 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG, Ibid.

[6] Ali Sakti, "Kegagalan Ekonomi Global", Republika, 14 Maret 2002.

[7] Laporan World Bank, 2004.

derivatif adalah cerminan akumulasi kekayaan para ‘kapitalis global’. Dan ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang sangat berbahaya.

Sistem kredit atau sistem hutang juga telah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Mekanisme bunga (*interest rate*) yang juga menggurita bersama sistem hutang ini, kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Kebangkrutan ekonomi sedang menghantui berbagai negara dan bahkan juga perorangan akibat perangkap sistem bunga tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dimana hutang rumah tangga Australia telah menyamai hutang luar negeri Negara. Bahkan berdasarkan data tahun 2001 menunjukkan hutang rumah tangga melebihi hutang luar negeri, yaitu hutang rumah tangga mencapai 201 triliun dolar AS, sedangkan hutang luar negeri hanya mencapai 172 triliun dolar AS.[8] Hal ini diakibatkan pemakaian kartu kredit yang berlebihan akibat dorongan keinginan dan syahwat. Data juga menunjukkan 6 dari 10 dolar Australia yang dibelanjakan adalah dalam bentuk hutang melalui kartu kredit. Tentu keadaan ini akan membuat kondisi ekonomi Australia akan lesu pada masa-masa mendatang akibat pendapatan perorangan akan tersedot untuk membayar hutang.

## B. *“Welfare Economics”*; Obat yang Gagal

Kegagalan ilmu ekonomi (kapitalisme dan variannya) dalam menyelesaikan tugas untuk memberikan kontribusi terhadap usaha perwujudan tujuan-tujuan kemanusiaan, telah banyak menghadapi gugatan. Bahaya kegagalan tersebut sudah dirasakan oleh para ekonom sepanjang sejarah ilmu ekonomi konvensional dan telah disampaikan oleh ekonom seperti Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), Ruskin (1819-1900), Hobson (1858-1940), Tawney (1880-1962), Schumacher (1891-1971) dan Boulding (1910-1993).

Varian terbaru dari ilmu ekonomi paska kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalisme *laisezz-faire* adalah *welfare economics* (ilmu ekonomi kesejahteraan). Ketika *welfare economics* pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an, hal ini membangkitkan harapan yang besar. Penggunaan kalimat ‘*welfare*’ sebelum kalimat *economics* memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi ini secara eksplisit mulai bersifat normatif, menjurus kepada bentuk kesejahteraan yang diinginkan semua orang, serta akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi aktualisasi kesejahteraan manusia. Namun, harapan tersebut ternyata terbukti salah tempat. *Welfare economics* tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap ilmu ekonomi konvensional lainnya. Kesejahteraan ternyata hanya didefinisikan dalam bentuk keinginan-keinginan individu yang mementingkan kepentingan pribadi yang tidak memberi ruang kepada altruisme atau kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan semua manusia. Bahkan ia mengarah menjadi *wertfreiheit* atau bebas dari pertimbangan nilai sebagaimana mitra ‘ilmu

---

[8] Berdasarkan laporan Gatraonline, 26 Desember 2001.

ekonomi positif-nya'.[9] Sejumlah ekonom[10] juga telah berusaha menyerang pendekatan *wertfreiheit* dalam w*elfare economics.*

Banyak contoh negara yang mencoba menerapkan welfare economics dengan berbagai versinya. Negara-negara tesebut disebut welfare state (negara kesejahteraan), mulai dari versi yang setengah-setengah seperti Amerika Serikat sampai pada bentuknya yang lebih kongkrit seperi di Swedia. Secara sederhana, negara kesejahteraan didefinisikan, "is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living".[11] Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain: mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; memberi proteksi sosial bagi setiap warga.[12]

Meskipun *welfare state* tersebut telah berupaya memperbaiki kondisi kelompok miskin di negara-negara industri, tetapi persoalan kemiskinan dan ketidakberuntungan tetap menonjol. Kemiskinan tetap saja terjadi dan bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok si miskin tetap belum dapat dipenuhi. Kesenjangan antara kelompok yang makmur dan kelompok miskin semakin lebar, bukan hanya pada pendapatan riil tetapi juga untuk akses kesehatan, perumahan, dan pendidikan tinggi. Dilema yang memusingkan, meski sudah dikeluarkan dana kesehatan yang besar (lebih dari 9 persen dari PDB di Swedia) tetap saja orang miskin dan orang-orang tua tidak bisa mendapatkan kesemapatan berobat secara segera. Di AS sendiri 31,3 juta rakyatnya (13,3 persen dari total penduduk) tidak memiliki asuransi kesehatan, pasar perumahan juga tidak terjangkau oleh kelompok miskin. Karena itu, golongan miskin hidupnya menyewa rumah dan harga sewa terus meningkat lebih cepat daripada pendapatan mereka. Selain itu biaya pendidikan juga naik lebih cepat lagi, sehingga menjauhkan dari kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Selain itu jutaan manusia di negara-negara paling kaya dan paling kokoh secara ekonomi juga terjebak dalam wilayah-wilayah kumuh perkotaan. AS juga menghadapi persoalan serius akibat defisit anggaran yang terus terjadi. Sedangkan Swedia menghadapi persoalan perpajakan dan inflasi yang tinggi. Negara *welfare state* gagal mewujudukan kesejahteraan bersama akibat tidak mengakui perlunya melakukan perubahan-perubahan radikal dalam sistem pasar. Negara hanya memberikan sedikit kosmetik dari sistem kapitalisme, agar memiliki wajah kemanusiaan.[13]

---

[9] M. Umar Chapra (2001), Op., Cit., hal. 47.

[10] Pandangan yang tajam sebagai contoh: Hutchinson, T.W., "Positive Economics and Policy Judgemnet" (London: Alien & Unwin, 1964); Gunnar Myrdal, "Objectivity in Social Research" (London: Gerald Duckworth, 1970); Robert L. Heilbroner, "Economics as a 'Value-Free' Science" (Social Research, 1973, hal. 129-142).

[11] Definisi Richard Quinney, "The Prophetic Meaning of Modern Welfare State", 1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, "Negara Kesejahteraan", Kompas, 17/10/2005.

[12] Lihat Amich Alhumami, "Negara Kesejahteraan", Kompas, 17/10/2005

[13] Untuk lebih detail melihat kegagalan Negara Kesejahteraan baca M. Umer Chapra "Islam and Economic Challenge" yang diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri menjadi "Islam dan tantangan Ekonomi", Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute, 2000, hal. 113-143.

Akibat kegagalan tersebut, sejumlah ekonom telah menekankan perlunya paradigma baru.[14] Paradigma tersebut merupakan muara dari kenyataan bahwa 'akal ekonom' memiliki keterbatasannya sendiri. Sehingga posisi yang sangat-sangat tinggi dan terlampau berlebihan yang diberikan oleh gerakan pencerahan Eropa harus lebih diturunkan menjadi ketingkat yang lebih realistis. Dalam paradigma baru ini terjadi peningkatan kesadaran bahwa kepentingan pribadi dan kompetisi bukanlah menjadi penentu utama dibalik tindakan manusia. Harus diperhatikan peranan altruisme, kerjasama, nilai moral, perbuatan-perbuatan sosial, institusi ekonomi dan politik dalam membentuk preferensi dan membimbing tindakan dalam masyarakat. Begitu juga pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial-ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang sesuai.

Hal ini kemudian mendorong berkembangnya beberapa aliran pemikiran yang berbeda (*alternative thought*) dari pandangan mainstream. Beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi alternatif (*alternative economics)* tersebut adalah:[15]

*Pertama,Grant Economics* yang berpendapat bahwa tingkah laku altruistik bukan merupakan sebuah penyelewengan dari rasionalitas. Pandangan ini juga memberikan argumen bahwa mempersamakan tingkah laku rasional dengan hanya tingkah laku mementingan diri pribadi adalah tidak realistis. Perintis konsep ini mengkritik ilmu ekonomi bebas nilai, yang mengabaikan bakat manusia dalam jangkauan analisis ekonominya. Dalam konsep ini juga menjelaskan fungsi ilmu ekonomi adalah untuk melahirkan prediksi yang tepat tentang kejadian yang akan datang, maka asumsi tingkah laku rasional dalam kerangka pemikiran altruisme dan kepentingan pribadi, dianggap akan melahirkan prediksi yang lebih berarti.

Kedua adalah Ekonomi Humanistik (*Humanistic Economics*) yang mempromosikan kesejahteraan manusia lewat cara pengakuan dan penyatuan seluruh susunan nilai-nilai dasar manusia. Penganut ilmu ekonomi ini mengkritik asas psikologi klasik kemanfaatan (*utility*) yang banyak mempengaruhi ilmu ekonomi. Asas psikologi tersebut lebih menekankan kepada nafsu dan kekayaan, sedangkan ekonomi humanistik lebih berkiblat kepada psikologi humanistik yang lebih menekankan kepada kebutuhan kepuasan dan perkembangan manusia. Sebagai konsekuensinya konsep ilmu ekonomi ini akan mempertimbangkan seluruh kebutuhan manusia. Meliputi kebutuhan yang termasuk fisiologis (makanan, pakaian dan tempat tinggal), psikologis (keselamatan, keamanan, kasih sayang dan perasaan harga diri), sosial (kepemilikan), atau moral (rasa kepercayaan, keadilan, status kedudukan).

*Ketiga,* Ekonomi Sosial (*Social Economics*) yang mencakup reformulasi bentuk teori ekonomi dengan pertimbangan-pertimbangan etika. Komitmen kepada pentingnya kenetralan nilai, sebagai kesucian cita-cita pencerahan ilmu yang telah diwariskan oleh ekonom masa pencerahan Barat, tidak bisa dipertahankan (*untenable*) dan tidak disukai

---

[14] Sebagai contoh: Kurt Dopfer dengan buku yang di editorinya "Economics in The Future: Towards a New Paradigm" (London: Macmilan, 1976); Thomas Balogh dengan bukunya "The Irrelevance of Conventional Economics" (London: Weidenfeld & Nicolson, 1982); David Bell dan Irving Kristol dengan buku yang di editorinya "The Crisis of Economics Theory" (New York: Basic Books, 1981).

[15] M. Umar Chapra (2001), Op., Cit., hal. 49-53.

(*undesirable*). Tidak dapat dipertahankan karena penelitian ilmiah berlandaskan asumsi yang secara diam-diam juga mencakup pertimbangan nilai. Tidak disukai karena penelitian ilmiah tidak mampu menolak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tujuan publik dan prioritas sosial dalam alokasi sumber daya (*resources alocation*).

Aliran pemikiran yang keempat ialah Ekonomi Institusional (*Institutional Economics*), yang berargumentasi bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh sejumlah hubungan institusi sosial, institusi ekonomi, institusi politik dan institusi relijius yang menentukan ekspektasi sikap individu. Aliran pemikiran ini menjanjikan harapan yang besar, karena dapat membantu menjelaskan tentang bagaimana perubahan pada institusi-institusi di setiap masa mempengaruhi masa sekarang dan masa depan, dan mengapa kinerja perekonomian yang satu lebih baik dari pada yang lainnya.

## C. Pandangan Islam; Mencari Solusi Ekonomi

Khurshid Ahmad pernah melontarkan pertanyaan mendasar dan menarik tentang bagaimana membangun perekonomian negara-negara Muslim selaras dengan peranan nilai ekonomi, politik dan ideologinya yang khas ? apakah masyarakat muslim bisa membangun perekonomian dengan mengikuti sistem kapitalis, sosialis maupun derivasinya, dengan ketergantungan (*depedency*) yang begitu kuat ? atau haruskah dilakukan rekonstruksi sosial-ekonomi secara total dengan asumsi, gagasan dan pola yang unik dan bernilai khusus untuk pembangunan dalam masyarakat muslim ?[16]

Sebagai pemikir ekonomi muslim 'garda depan', pemikiran Khursid Ahmad tentu berangkat dari realitas yang terjadi dan melingkupi negeri-negeri muslim. Dimana hampir sebagian besarnya memiliki sumber daya yang luar biasa tetapi keadaan ekonominya tetap tak berkembang, standar hidup rakyatnya masih rendah, dan bahkan cenderung hidup dalam keadaan *subsisten*. Mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidakseimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial sebagai prototipe pola hubungan 'pusat-pinggiran' (*centre-periphery relationship*). Dunia Islam mengalami paradoks, ketika mengunakan prototipe pertumbuhan sebagai pola pembangunan yang dirancang pakar dan praktisi barat yang kemudian 'dijual' kepada perencana negara muslim melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, infiltrasi intelektual dan cara lainnya. Dari berbagai kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan bahwa strategi imitasi gagal untuk menghasilkan kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islami.

Untuk mengurai persoalan pelik yang dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka befikir. Kerangka berfikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan diatas. Dalam kerangka berfikir tersebut harus

---

[16] Khursid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam Ainur R. Sophian (Ed), "Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam", Surabaya: Risalah Gusti, 1997. hal. 1.

dicanangkan sebuah premis baru bahwa pembangunan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Al-Qur'an dan As-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar. Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif. Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan *ideal type*, kendatipun kita juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik-ekonomi yang khas dari kazanah peradabannya.[17] Sehingga akan terjadi kesulitan besar dan bahkan cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh kedalam masyarakat muslim, hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar yang membentuk bangunan kemasyarakatan dari masing-masing peradaban. Pendekatan Islam haruslah jelas-jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilainya. Konsep pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam Islam mempunyai pengertian khusus dan unik. Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi (*social justice and human rights*), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.

Dari kronologis diskusi diatas menjadi sangat relevan bagi kita untuk mengkaji pandangan Islam untuk memecahkan persoalan ekonomi. Dan ini bermuara pada pengkajian konsep-konsep dasar Ilmu Ekonomi Islam untuk melakukan transformasi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Harus diakui bahwa proyek ilmu ekonomi Islam dan Islamisasi ilmu ekonomi telah menjadi obor terdepan bagi proyek Islamisasi ilmu. Bahkan para penggiat perbankan dan keuangan Islam juga telah berhasil mengukuhkan terwujudnya sistem keuangan Islam secara global dan diakui eksistensinya dalam percaturan ekonomi di Dunia hari ini.

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*). *Worldview* Islam yang menjadi dasar ini oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah; Maulana al-Maududi mengistilahkannya dengan *Islami nazariat* (*Islamic Vision*), Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islami* (*Islamic Vision*), Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islami* (*Islamic Principle*), sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya *Ru'yatul Islam lil Wujud* (*Islamic Worldview*).[18] Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama' dan Cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (*worldview*) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat. *Worldview*

---

[17] Ibid., hal. 7-8.

[18] Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005, hal. 11.

ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berfikir (*mental framework*).

Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detil hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Dan Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan.[19]

*Worldview* Islam memberikan pijakan bahwa bahwa umat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh sumber kehidupan (*resources*) yang tersedia adalah amanah-Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki hubungan persaudaraan yang alamiah dan mereka juga harus bertanggungjawab kepada-Nya. Oleh karena itu manusia tidak secara mutlak bebas untuk melakukan apa saja, akan tetapi mereka diharapkan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) dan berinteraksi antara satu dengan lainnya serta membangun lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perwujudan kesejahteraan bersama (*mutual welfare*) setiap individu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, hitam atau putih, lelaki atau perempuan serta anak-anak atau orang dewasa. Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian tujuan materi, akan tetapi juga tujuan spiritual dan kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan *anomie*.[20]

Islam menekankan pembanguan ‘insan seutuhnya’ (*human development*) menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiin*).[21] Pembangunan mendasarkan diri pada konsep *tazkiyah an-nafs* dengan titik tumpu pada penyempurnaan akhlak dan kepribadian. Karena pribadi adalah bagian penting dalam pembentukan peradaban. Asas ketenangan (*internal harmony*) merupakan hasil dari proses tazkiyah. Ibnu Khaldun pernah melukiskan betapa agama dapat menghasilkan transformasi sosial (*social transformation*). Dan sebaliknya manakala sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan maka akan lahir babak kehancuran dari peradaban (*the decay of civilization*). Dengan konsep tazkiah ini maka diharapkan terbentuk: konsep pembangunan Islami yang memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material; fokus usaha dengan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia; pembangunan ekonomi adalah aktifitas yang multidimensional; pembangunan ekonomi menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif; dan

---

[19] Ali Sakti, “Pengantar Ekonomi Islam”, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003, hal. 16.

[20] M. Umar Chapra (2001), Op., Cit., hal. 49-53.

[21] Anwar Ibrahim, “Islam dan Pembangunan Ekonomi Ummat”, dalam Ainur R. Sophian (Ed) *Ibid*, hal 63-65.

adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan ini dilaksanakan dengan semangat keadilan.

Kebijakan pembangunan islami yang ideal harus berorientasi untuk: meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas sumber daya yang tersedia; dan menjamin keadilan distributif dan memberantas praktik eksploitasi. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Sebuah doktirn yang melekat dan menyatu dalam kepribadian masyarakat (*built-in in-doctrination*). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral. Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah; pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru. Kedua, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, ketiga menegakkan nilai-nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*legal enforcement*). Juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti; pelatihan dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian yang cukup, perumahan yang nyaman, lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang layak, dan fasilitas transportasi. Dan ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan yang terbaik. Peranan positif negara ini tidak bisa disamaakan dengan istilah 'intervensi' negara dibawah sistem kapitalis.[22]

Transformasi masyarakat yang diharapkan adalah proses secara bertahap untuk menuju pada kejayaan suatu masyarakat. Masa kejayaan senantiasa membawa kemajuan-kemakmuran, begitupula masa kemunduran peradaban Islam juga ditandai oleh kedzaliman, kemiskinan, dan kelaparan. Hal ini setidaknya yang dipotret oleh Ibnu Khaldun ketika menganalisis 'sejarah peradaban/sejarah dinasti'. Dari pandangan beliau kemudian masyurlah "delapan prinsip kebijaksanaan (*kalimat hikamiyyah*)" dalam karya besarnya *Muqaddimah* yang kemudian diformulasi oleh Dr. Chapra menjadi 'siklus rantai reaksi' untuk melihat proses 'kemajuan–kemakmuran' atau 'kemunduran-kemiskinan' suatu bangsa. Dari *Kalimat hikamiyyah* Dr. Chapra membuat rumusan yang mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun. Rumusan tersebut interdisipliner menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk *Syari'ah* (S), kekuasaan politik atau *waazi*'(G=*government*), masyarakat atau *rijal* (N=*number of people*), kekayaan atau sumber daya atau *Maal* (W=*wealth*), pembangunan atau *imarah* (g=*development*) dan keadilan atau '*adl* (j=*justice*).[23] Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Di dalam analisa jangka panjang rumusan ini, tidak ada klausa *ceteris paribus* karena tidak ada satu variabel pun yang konstan. Dalam bagian berikut ini akan diulas bagaimana peran manusia –yang sangat sentral dalam proses transformasi- yang didorong oleh paradigma berfikirnya akan

---

[22] M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophian (Ed), *Ibid*, hal. 23-35.

[23] M. Umer Chapra (2001), Op., Cit., hal. 145-241.

dibedah. Manusia dalam konsepsi teori ekonomi konvensional memiliki persoalan serius, karena gagal mengabstraksikan filosofi manusia dalam bangunan teorinya.

## D. Prilaku Ekonomi yang Diharapkan

Dalam konsepsi Islam, prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan seharusnya berpijak pada landasan-landasan syari'ah. Selain itu, juga mempertimbangkan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah. Disisi lain, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini terdapat dua makna penting; *pertama,* definisi ini menyiratkan prilaku manusia tersebut terfokus sebagai prilaku yang bersifat individual. *Kedua*, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakekatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.[24]

Definisi ekonomi konvensional ini berkembang dari pemahaman motif-motif ekonomi yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi kapitalis. Francis Ysidro Edgworth (1845-1926) merupakan tokoh sentral yang mengemukakan motif *self interest* (*egoism* dan *utilitarianism*) dari prilaku ekonomi manusia. Dari diskursus intelektual mengenai motif prilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional, sesungguhnya telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki andil dalam prilaku ekonomi manusia. Namun Edgworth (1881) memiliki alasan kuat bahwa hanya egoismelah yang menjadi landasan nilai yang sangat konsisten bagi prilaku manusia (*egoistic behaviour*). Landasan nilai egoisme ini menurut Amartya Sen (1979) kemudian menjadi motif ekonomi yang menggunakan pendekatan rasional (*rational choice*). Pendekatan rasional ini diyakini menunjukkan konsistensi internal dari seorang individu dalam berprilaku. Dan dengan landasan inilah kemudian secara substansi ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan.[25]

Ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan diatas. *Pertama* adalah sumber landasan nilai yang muncul. M.N. Siddiqi[26] mengemukakan bahwa sumber utama dari prilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengetahuan itu bukan buah fikiran pakar ekonomi Islam, tapi 'ide langsung' dari Allah SWT. Sementara itu sumber pengetahuan dari prilaku dan institusi ekonomi konvensional adalah intelegensi dan intuisi akal manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif prilaku itu sendiri. Ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan di atas nilai

[24] Ali Sakti (2003), Op., Cit., hal. 16.

[25] Lihat paper Amartya K. Sen, "Rational Fool: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory", dalam buku "Philosophy and Economic Theory", yang dieditori oleh Frank Hahn and Martin Hollis, Oxford University Press (1979), hal. 87-109. Lihat juga F.Y Edgeworth, "Mathematical Psychic: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences" (London, 1881).

[26] Muhammad Najatullah Siddiqi, "Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines", The International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA: Herndon, Virginia, 1995, hal. 255.

altruisme, sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.

Dari banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam, setidaknya terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam.[27] *Pertama,* menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah dalam kerangka halal. Usaha-usaha tersebut tidak bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi (*gharar*) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah. Hal ini juga berlandaskan pada surah al-Baqarah ayat 72 & 168 serta an-Nisaa ayat 29.˙ Dalam ekonomi Islam pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang aktifitas itu secara syariah. *Kedua,* hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*). Prinsip ini sejalan dengan panduan al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 31-32 & al-Israa ayat 29. *Ketiga,* implementasi Zakat (*implementation of zakat*). Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat. Prinsip ini sebagaimana diisyaratkan dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103. *Keempat*, penghapusan/pelarangan Riba atau Bunga (*prohibition of riba*), *Gharar* dan *Maisir*. Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala prilaku buruk yang merusak sistem, seperti prilaku menipu, spekulasi atau judi. Sebagaimana surah al-Baqarah ayat 274-781 menjelaskan tentang hal ini.

Keempat prinsip utama ini tentu bukan hanya memberi batasan-batasan moral saja dalam aktifitas dan sistem ekonomi Islam, tetapi juga memiliki konsekwensi-konsekwensi yang menciptakan bangunan ekonomi Islam. Konsekwensi yang jelas sekali misalnya adalah eksistensi lembaga Baitul Mal sebagai respon langsung dari ketentuan implementasi sistem zakat dalam kebijakan fiskal Negara. Atau dominasi konsep bagi hasil dalam dunia keuangan dan investasi sebagai konsekwensi pelarangan bunga (riba). Juga adanya lembaga al-Hisbah untuk mengawasi pasar. Prinsip-prinsip ini utamanya dimaksudkan agar segala aktifitas manusia betul-betul dapat mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dari prilaku individual dan juga kolektif yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala prilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam prilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*).[28]

---

[27] Ali Sakti (2003), Op., Cit., hal. 20.

[28] Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy," The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, 1997, hal. 157.

*Mashlahah* merupakan motif yang dominan diantara ketiga motif yang ada, Dr. Akram Khan menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah parameter prilaku yang bernuansa *altruisme* (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar (fitrah), dimana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.

Dalam paradigma ekonomi Islam harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Dan nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept,* yang sebaiknya mengalir. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept,* yang mendorong prilaku penumpukan dan penimbunan.[29]

Dr. Muhammad Arif[30] menjelaskan bahwa ekonomi konvensional lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional sejalan dengan landasan filosofinya yang menjadikan kelimpahan materi sebagai parameter. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa kecenderungan pelaku pasar dalam sistem konvensional begitu konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis.

## E. Prilaku Konsumsi Individu dan Masyarakat

Beberapa ahli ekonomi Islam telah membuat kesimpulan menarik berkaitan dengan hubungan antara prilaku ekonomi (*economic behavior*) dan tingkat keyakinan atau keimanan individu atau masyarakat. Dalam pandangan tersebut disimpulkan, pada tingkatan realitas atau kenyataan, prilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang atau masyarakat. Prilaku ini kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan produksi di pasar.

Kesimpulan tersebut menjelaskan tiga karakteristik prilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi:[31] *Pertama,* ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh motif *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*). *Kedua,* ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinganan yang bersifat individualistis.

---

[29] Lihat Adiwarman Azwar Karim, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), 2002, hal. 19 – 22.

[30] Muhammad Arif, "Towards the Syari'ah Paradigm of Islamic Economics: The beginning of Scientific Revolution", Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 4, July 1985.

[31] Lihat Ali Sakti (2003), Op., Cit., hal. 25.

*Ketiga,* ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi individu atau masyarakat tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme. Dalam prilaku konsumsipun tak terlepas dari perspektif tersebut.

Sesunguhnya motif berkonsumsi atau berproduksi individu atau masyarakat muslim seharusnya akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; *mashlahah*, kebutuhan dan kewajiban[32]. Sementara itu Dr. Qardhawi[33] menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Sedangkan pada perspektif konvensional, aktifitas konsumsi seseorang sangat erat kaitannya dengan pemaksimalan kepuasan (*utility*). John Hicks (1904-1989)[34] memberikan penjelasan tentang konsumsi ini menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*budget constraint*). Tingkat pendapatannya akan dioptimalkan untuk memaksimalkan konsumsi barang/jasa, tabungan dan investasi untuk kepuasannya sendiri. Pemaksimalan kepuasan ini dipengaruhi oleh dorongan yang didominasi nilai-nilai individualisme, ego, keinginan dan rasionalisme. Jauh dari nilai altruisme.

Bagi individu atau masyarakat muslim, pendapatan (*income*) merupakan alat untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akherat (*falah*). Dr. Monzer Kahf[35] melakukan analisis tajam mengenai 'pengeluaran akhir' (*final spending/FS*) sebagai variabel standard dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh seorang konsumen muslim. Dalam konsep tersebut, beliau memasukan komponen zakat sebagai variabel yang menjadi keharusan dalam prilaku konsumsi individu muslim (bagi yang mampu). Sehingga secara lengkap 'pengeluaran akhir (FS)' dari penghasilan yang didapat seorang muslim meliputi; konsumsi barang/jasa, tabungan, investasi, zakat, infak-shadaqah, serta wakaf bagi yang mampu. Hal ini didasari oleh semangat kemaslahatan bersama dan tumbuh suburnya nilai-nilai altruisme yang mengakar dalam individu dan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang hanya memasukan pengeluaran akhir individu kapitalis yang hanya mencakup; konsumsi barang/jasa dan maksimalisasi tabungan dan investasi saja.

Selain itu terdapat konsep yang fundamental dalam paradigma konsumsi menurut Islam. Dalam konsepsi Islam; kebutuhan (*need*) berbeda dengan keinginan (*want*) dan syahwat (*desire*). Dalam lingkungan mayarakat yang kapitalis dan konsumeris tentu akan sangat sulit membedakan hal ini. Tetapi bagi individu atau masyarakat yang memiliki keimanan yang tinggi akan mudah membedakan hal ini. Kebutuhan (*need*) adalah sesuatu

---

32 Muhammad Akram Khan (1997), Op., Cit., hal. 157.

33 Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," Jakarta: Rabbani Press, 1995.

34 Lihat pemikiran John Hicks dalam Steven Pressman, "Fifty Major Economists". Edisi terj. "Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 196-202.

35 Monzer Kahf, "A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif", Longman Malaysia (1992), hal. 90 – 112.

yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat hidup normal. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia dalam kondisi sengsara dan tidak dapat hidup normal. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada. Sedang keinginan (*want*) yaitu sesuatu tambahan-tambahan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Meski kepuasan sangat relatif bagi setiap orang, namun yang pasti, bila keinginan tidak terpenuhi maka kelayakan hidup tidak akan berkurang. Sedangkan syahwat (*desire*) merupakan dorongan dalam diri manusia yang diakibatkan oleh sifat-sifat buruk. Seperti dorongan kedengkian, iri hati, tamak, rakus, sombong, ingin dihormati dll. Syahwat inilah yang biasanya memunculkan keinginan yang tidak sehat pada diri manusia. Membuat tidak rasional dalam keputusan-keputusan finansial.

Kemampuan membedakan antara kebutuhan, keinginan dan syahwat adalah bagian penting dalam panduan prilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Karena kalau tidak dapat membedakan yang mana pengeluaran sebagai kebutuhan dan yang mana sebenarnya sebagai keinginan dan syahwat konsumsi, maka individu atau masyarakat akan menjadi boros dan konsumeris. Boros dalam padangan Islam sebagai bentuk ke-mubadziran. Tidak bisa membedakan antara syahwat, keinginan dan kebutuhan juga bisa membuat individu atau masyarakat tidak bisa menentukan dengan baik prioritas dalam melakukan pengeluaran. Malah, bisa jadi akan mengorbankan suatu kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan syahwat.

Kesimpulan penting dari pandangan Islam untuk panduan konsumsi adalah meletakan motif utama dalam prilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah*, kebutuhan dan ibadah. Selain itu tujuan aktivitas ekonomi individu muslim adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Sehingga dengan motif dan tujuan ini prilaku ekonomi manusia yang diharapkan juga akan berorientasi pada semangat kesejahteraan bersama (*altruisme*). Individu dan Masyarakat akan mencapai kepuasan manakala 'pengeluaran akhir' dari penghasilan mereka juga optimal untuk kedermawanan atau kesejahteraan bersama seperti zakat, infak-shadaqah, serta wakaf dan bentuk kebaikan lainnya. Dan sangat menarik untuk mengkaji dampak ekonomi sebagai implikasi dari sikap kedermawanan pada masyarakat muslim dengan teori ekonomi yang ada. Perlu dikaji bagaimana Zakat dan Wakaf berpengaruh dalam perekonomian dan bekerja untuk transformasi masyarakat.

## F. Mekanisme Ekonomi Zakat untuk Transformasi Masyarakat

Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan;[36] *pertama*, golongan masyarakat Muzakki yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. *Kedua*, golongan masyarakat non-Mustahik/Muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (golongan *middle income*). *Ketiga*, golongan masyarakat Mustahik yaitu golongan masyarakat penerima zakat.

[36] Ali Sakti (2003), Op., Cit., hal. 26.

Golongan Muzakki adalah kelompok yang mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Bahkan mampu mengeluarkan infak-shadaqah dan wakaf. Bagi kelompok ini, harta merupakan alat untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akherat (*falah*). Sehingga secara lengkap *final spendirg* (FS/pengeluaran akhir) dari penghasilan yang didapat kelompok ini meliputi; konsumsi barang/jasa, tabungan, investasi, zakat, bahkan infak-shodaqoh serta wakaf. Sehingga pengeluaran mereka akan banyak memberikan *falah*. Sedangkan golongan *mid-income* mampu memenuhi kebutuhan primernya dan masih memiliki kemampuan untuk berkonsumsi barang sekunder. Meskipun begitu kekayaannya belum mencapai nisab. Sehingga dalam upaya memaksimalkan pengeluaran akhir-nya untuk mencapai *falah*, golongan ini bisa mengeluarkan infak atau shodaqoh.

Pada model konsumsi golongan Mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Masuk dalam kategori pengeluaran sepenuhnya bersumber dari zakat ini adalah; *fakir*, *ibnussabil* dan *fisabilillah*. Karena mereka memang tidak memiliki penghasilan. Sedangkan sumber konsumsi Mustahik kategori miskin (*masakin*), yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus dipenuhi oleh zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islami untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (*guarantee of a minimum level of living*). Institusi negara yang bernama Baitul Mal-lah dalam konsep ekonomi Islam yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut dengan mengambil kekayaan dari kelompok Muzakki untuk dibagikan kepada kelompok Mustahiq. Dengan tepenuhinya kebutuhan hidup minimal maka seluruh masyarakat Islam diharapkan akan menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai hamba Allah SWT, tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang mungkin memang diluar kemampuannya.

Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infak-shodaqoh dan intsrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu ummat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum. Karena itulah infak-shodaqoh dan instrumen sejenisnya inilah yang oleh Baitul Mal digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Jadi zakat dan infak-shadaqah memiliki perannya masing-masing. Pada kondisi ummat yang baik dimana tingkat keimanannya pada *level* yang baik, maka pendapatan negara yang bersumber dari infak-shadaqah seharusnya akan lebih besar dari penerimaan zakat.

Jika dikaji lebih jauh, instrumen zakat sesungguhnya dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat.[37] Bahkan Dr. Metwally[38] mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi

---

[37] Ibid., hal. 26.

[38] Dalam papernya yang ada dalam buku Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), "Money and Banking In Islam", International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, Pakistan, 1996, hal. 17-18.

serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Secara logika, zakat terkesan atau seolah-olah memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi akibat perhatian bahasan zakat terfokus terhadap mekanisme yang terjadi pada golongan masyarakat Muzakki. Padahal golongan yang sangat dominan dalam kaitan dengan zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Sehingga zakat yang diterima mustahik akan senantiasa dibelanjakan untuk konsumsi. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian.

Model konsumsi secara makro dalam Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan konvensional, yaitu model konsumsi yang ditentukan oleh konsumsi pokok (*autonomous*) dan konsumsi yang berasal dari pendapatan (*income*). Jika dianalisa lebih spesifik pada sisi mustahik, maka secara jelas bahwa zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. Sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *under-consumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.[39]

Yang membedakan perekonomian Islam dengan konvensional dalam hal ini adalah wujudnya instrumen yang bersifat terlembagakan dalam bangunan sosial dalam Islam, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya mereka yang tidak memiliki akses ekonomi), seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Oleh Dr. Faridi[40] mekanisme sosial ini disebut sebagai sektor sukarela (*voluntary sector*) atau sektor ketiga (*third sector*) melengkapi sektor yang telah ada (*monetary* dan *real sector*).

Lebih lanjut Dr. Monzer Kahf,[41] mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu

---

[39] Ali Sakti (2003), Op., Cit., hal. 27.

[40] F.R. Faridi, "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam", Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB), hal. 129-148.

[41] Monzer Kahf, The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999, hal. 5.

investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Dan investasi adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf[42] juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan resiko pembiayaan/kredit macet (*non-performing financing/NPF*), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang yang terjebak hutang. Sehingga secara riil, zakat akan menekan tingkat pengangguran.

Selain itu implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. *Pertama,* implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. *Kedua,* perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. *Ketiga, multiflier effect* munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja.

## G. Strategi Ekonomi Wakaf untuk Transformasi Masyarakat

Salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah Wakaf. Masyarakat non-muslim boleh memiliki konsep *philanthropy* tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen Zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mustahiq. Wakaf adalah sebentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilkan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Mengeser '*private benefit*' menuju '*social benefit*'.[43]

Sayangnya potensi wakaf, yang banyak dimiliki kurang dimanfatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat Indonesia saja menurut data Depag (2003) mencapai 1.535,19 Km² -jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura- yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf tunai (dengan uang). Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan Ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri yang ternyata membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya

[42] Ibid., hal. 6.

[43] Abdul Aziz Setiawan, "Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat", Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004 (Sya'ban 1425) hal. 50.

pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.

Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat *return* 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Apakah ini realistis? Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecilpun bisa menikmati pahala abadi wakaf, mereka tidak harus menunggu menjadi 'tuan tanah' untuk menjadi *Muwaqif*, sehingga sangat potensial. Selain itu kalau kita menilik potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, kita akan optimis. Tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Disebutkan 96 persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga non-keagamaan (PIRAC, 2002).

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan ummat.[44] Pertama, Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf & wakaf tunai. Seluruh komponen ummat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesadaran berwakaf. *Kedua*, Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin. Tanah wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing; terutama dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.

*Ketiga*, Membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah. Pemerintah Arab Saudi, misalnya, belakangan mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya 'Bank Wakaf' di Bangladesh. Keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya. *Keempat*, Reoptimalisasi pemanfaatan asset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna, dan seterusnya.

---

[44] Abdul Aziz Setiawan, Ibid., hal. 51.

*Kelima*, Memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun diatas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memilki talenta bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif. *Keenam*, Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Manan yang mendirikan "Bank Wakaf" dengan konsep *Temporary Waqf*, dimana dana wakaf pemanfaatannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan nantinya pokok wakaf dikembalikan pada *Muwaqif*. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatakan kebolehannya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi yang beresiko, dimana kemudian resiko ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Wallahu a'lam bi al-shawab*.